

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Analisis Pengelolaan Aset dan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilo'e Desa Boentuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset BUMDes Boentuka belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Beberapa tahap pengelolaan aset, seperti perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset, masih ditemukan adanya ketidakteraturan dan kekurangan prosedur yang jelas. Hal ini terlihat pada minimnya pencatatan yang sistematis terhadap aset yang dimiliki BUMDes, serta kurangnya evaluasi dan penghapusan aset yang sudah tidak digunakan.
 - a) Perencanaan Aset: Perencanaan awal BUMDes yang terstruktur mengalami perubahan seiring waktu, dimana pengurus BUMDes lebih sering melakukan perencanaan internal tanpa melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil kurang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa.
 - b) Pemeliharaan dan Penghapusan Aset: Pemeliharaan aset, seperti tenda yang disewakan, sering kali diabaikan, dan tidak ada prosedur resmi terkait penghapusan atau pemindahtanganan aset yang sudah rusak. Proses penghapusan dan pemindahtanganan aset yang tidak jelas menghambat pengelolaan aset yang efisien.

- c) Pengelolaan keuangan BUMDes Boentuka juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini tercermin pada pencatatan yang tidak konsisten dan kurangnya pelaporan yang transparan. Beberapa transaksi keuangan tidak tercatat dengan rinci, dan laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mengarah pada risiko penyalahgunaan dana.
- d) Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BUMDes, mereka mengakui bahwa meskipun ada upaya untuk menjalankan pengelolaan aset dan keuangan, keterbatasan sumber daya dan kurangnya pedoman yang jelas menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, BUMDes Boentuka membutuhkan pedoman yang lebih jelas terkait dengan prosedur pengelolaan aset dan keuangan yang berlandaskan pada peraturan yang berlaku.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran yang dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan pengelolaan aset dan keuangan di BUMDes dengan fokus pada implementasi regulasi yang ada, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan dan aset di BUMDes yang belum berjalan optimal.

2. Bagi Pemerintah Desa Boentuka dan BUMDes Boentuka

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Aset dan Keuangan Pemerintah Desa Boentuka dan BUMDes Boentuka perlu menyusun pedoman yang jelas terkait dengan pengelolaan aset dan keuangan, yang mengacu pada PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dan keuangan dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan akuntabel.